



**Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung**

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2020**

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur, Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT, bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019 telah dapat disusun dengan baik.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019 ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD), serta pada Pasal 71 ayat 2 yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran tersebut.

Laporan ini dilaksanakan sebagai salah satu pertanggungjawaban dimana Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akhir kata, kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan maka kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan ini. Terimakasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini.

Pangkalpinang, 5 Maret 2020

Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



H. FERY INSANI
NIP. 19700620 199903 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 69 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD), serta pada Pasal 71 ayat (2) yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran tersebut.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), melaksanakan mekanisme pertanggungjawaban, yang salah satunya melalui mekanisme kewajiban Kepala Daerah dalam menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 30 Seri E);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 21 Seri E).

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang ke 32 (tiga puluh dua), dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada awal terbentuknya provinsi, terdapat 2 (dua) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

C. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geografis terletak pada 105°50' sampai 108°30' Bujur Timur dan 1°50' sampai 3°10' Lintang Selatan. Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang sekitarnya dikelilingi pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Bentuk wilayah sangat berpengaruh terhadap pemilihan *type land utilization*, land management dan pengembangan infrastruktur yang pada prinsipnya ditentukan oleh geological formation, termasuk di dalamnya gaya-gaya teknik dan proses erosi. *Geological formation* tersebut menentukan relief wilayah.

a. Batas Wilayah

Berdasarkan batas wilayahnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan:

- Selat Karimata di sebelah Timur;
- Laut Jawa di sebelah Selatan;
- Selat Bangka di sebelah Barat; dan
- Laut Natuna di sebelah Utara.

b. Luas Wilayah

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 81.725,14 km². Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km² atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut lebih kurang 65.301 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratan terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Kabupaten Bangka luas wilayah | : 2.950,68 km ² |
| - Kabupaten Bangka Barat luas wilayah | : 2.820,61 km ² |
| - Kabupaten Bangka Tengah luas wilayah | : 2.155,77 km ² |
| - Kabupaten Bangka Selatan luas wilayah | : 3.607,08 km ² |
| - Kabupaten Belitung luas wilayah | : 2.293,61 km ² |
| - Kabupaten Belitung Timur luas wilayah | : 2.506,91 km ² |
| - Kota Pangkalpinang luas wilayah | : 89,40 km ² |

Berdasarkan wilayah administrasi, pemerintah kabupaten/kota terbagi dalam wilayah kecamatan, kelurahan/desa dengan rincian per kabupaten pada tahun 2016 sebagai berikut:

- Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan, 19 kelurahan dan 62 desa;
- Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan, 4 kelurahan dan 60 desa;
- Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 6 kecamatan, 7 kelurahan dan 56 desa;
- Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 8 kecamatan, 3 kelurahan dan 50 desa;
- Kabupaten Belitung terdiri dari 5 kecamatan, 7 kelurahan dan 42 desa;
- Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 kecamatan dan 39 desa;
- Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan.

c. Topografis

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan Hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi di Pulau Bangka terdapat pada puncak Gunung Maras dengan ketinggian 699 meter dan di Pulau Belitung

titik tertinggi pada puncak Gunung Tajam dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut.

Profil wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya beragam mulai dari daratan, bergelombang berbukit hingga bergunung, dengan komposisi lahan datar mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan tersebar di Pulau Bangka dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa yang terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah.

d. Geologi

Kondisi geologi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup potensial untuk kawasan pengembangan. Hampir diseluruh wilayah. Material timah (tin), Kaolin, Kuarsa (*quartz*) dan bilitonite (dikenal dengan nama "satam"). Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca. Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya.

e. Hidrologi

Daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (*Sunda Shelf*) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter.

Sebagai daerah perairan, Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka.

Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai antara lain: Sungai Baturusa, Sungai Kepoh, Sungai Kotawaringin, Sungai Ajang Mabat dan Sungai Kurau di Pulau Bangka, sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cerucuk, Sungai Buding, Sungai Lenggang.

f. Klimatologi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim tropis kering selama 3 bulan berturut-turut, dimana iklim basah mencapai 7 bulan sampai dengan 9 bulan. Curah hujan berkisar antara 67,9 mm sampai dengan 409 mm atau curah hujan rata-rata per tahun 238,45 mm. Pada bulan Agustus dan September suhu udara berkisar antara 23,5 °C sampai dengan 32,1 °C dengan kelembaban udara

terendah 72–73%. Kelembaban udara tertinggi mencapai 89% dan umumnya terjadi pada bulan Desember.

g. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh hutan negara, perkebunan, tegalan dan permukiman. Namun berdasarkan data numerik yang diperoleh dari BPS, terlihat juga bahwa lahan kering yang tidak termanfaatkan juga cukup luas (lahan bukan sawah) mencapai 121.407 Ha. Lebih detailnya dapat diperhatikan Tabel II.9. Dari seluruh luas lahan, 69% telah digunakan untuk pertanian legal/kebun/ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara/swasta, dan lahan sawah. Sedangkan sisanya merupakan bangunan, pekarangan, padang rumput dan lahan yang sementara tidak diusahakan.

Tabel I.1.

Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian Sawah	13.262	15.719	15.719	22.771	25.058	25.093
Tegalan	109.820	113.105	113.105	117.376	99.038	97.930
Ladang	44.085	30.348	30.348	28.147	27.435	30.416
Perkebunan	334.698	441.152	441.152	367.848	391.064	394.408
Hutan Rakyat	71.323	47.753	47.753	42.637	43.315	43.661
Pengembalaan	4.235	1.815	1.815	2.263	3.232	3.232
Tanah kosong/ (sementara tidak diusahakan)	126.272	76.588	76.588	67.415	55.987	59.174
Lain-Lain (pekarangan)	388.068	397.806	397.806	538.195	529.810	519.497
Permukiman	550.651	517.741	517.741	455.762	489.080	490.607
JUMLAH	1.642.414	1.642.027	1.642.027	1.642.414	1.664.018	1.664.018

Sumber : Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kep. Bangka Belitung paling besar digunakan untuk lain-lain (pekarangan) 519.497 ha, kemudian digunakan untuk permukiman sebesar 490.607 Ha dan perkebunan sebesar 394.408 Ha dan luas penggunaan lahan paling kecil di peruntukan pada pengembalaan sebesar 3.232 Ha.

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian,

pertambangan, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034.

(1) Kawasan hutan produksi

Pengembangan kawasan hutan produksi dilakukan melalui penataan batas kawasan hutan produksi, identifikasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi yang kritis dan/atau yang mengalami kerusakan (deforestasi), peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dengan pendekatan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi oleh pembangunan di luar sektor kehutanan sesuai peraturan perundangan, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi, pengembangan pemanfaatan hasil hutan pada kawasan hutan produksi (kayu dan bukan kayu), pengawasan dan evaluasi terhadap pengguna kawasan hutan produksi baik pembangunan sektor kehutanan maupun non kehutanan.

Penetapan kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 436.647,89 Ha, dengan perincian :

- a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 78.368,92 (tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan koma sembilan dua) Ha;
- b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 67.083,52 (enam puluh tujuh ribu delapan puluh tiga koma lima dua) Ha;
- c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 85.497,75 (delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh lima) Ha;
- d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 106.451,10 (seratus enam ribu empat ratus lima puluh satu koma satu nol) Ha;
- e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 43.595,77 (empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima koma tujuh tujuh) Ha; dan
- f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 55.650,83 (lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh koma delapan tiga) Ha.

(2) Kawasan peruntukan pertanian

Pengembangan kawasan peruntukan pertanian dilakukan melalui penetapan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari pertahanan pangan nasional, pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, penetapan kawasan peruntukan budidaya hortikultura dengan memperhatikan aspek sumber daya hortikultura, potensi unggulan yang ingin dikembangkan, potensi pasar, kesiapan dan dukungan masyarakat, serta kekhususan dari wilayah, penetapan kawasan peruntukan budidaya hortikultura wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lainnya, meningkatkan pemanfaatan lahan kering kurang produktif sebagai lahan pertanian pangan dan pertanian

hortikultura, mengembangkan bibit unggul komoditas unggulan pertanian dan/atau perkebunan dan melakukan peremajaan secara berkala, penetapan kawasan peruntukan budidaya perkebunan sebagai usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan dapat melakukan diversifikasi usaha dengan kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya, penetapan kawasan peruntukan sentra peternakan ternak besar, kecil dan unggas secara integratif dengan kegiatan pertanian hortikultura dan atau perkebunan, penetapan kawasan peruntukan budidaya peternakan ternak besar, kecil dan unggas melalui komoditas ternak unggulan nasional, daerah dan atau komoditas ternak strategis dengan pengembangan kelompok tani menjadi kelompok usaha dan dapat diintegrasikan pada kawasan budidaya lainnya dan didukung oleh ketersediaan sumber air, pangan, teknologi, kelembagaan serta pasar, pelaksanaan budidaya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penetapan tata batas kawasan peruntukan perkebunan komoditas unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, dan membangun prasarana dan sarana pertanian/perkebunan guna peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk.

Penetapan kawasan peruntukan pertanian seluas 903.450 (sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh) Ha terdiri dari:

- a. Kawasan pertanian tanaman pangan dengan luas kurang lebih 355.453 Ha, meliputi:
 - a.1 Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 36.330 Ha;
 - a.2 Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 72.433 Ha;
 - a.3 Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 11.044 Ha;
 - a.4 Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 171.350 Ha;
 - a.5 Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 25.763 Ha;
 - a.6 Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 38.473; dan
 - a.7 Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 60 Ha.
- b. Kawasan pertanian hortikultura dengan luas kurang lebih 221.512 Ha, meliputi:
 - b.1 Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 53.116 Ha;
 - b.2 Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 33.245 Ha;
 - b.3 Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 23.171 Ha;
 - b.4 Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 52.958 Ha;
 - b.5 Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 40.252 Ha;
 - b.6 Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 18.000 Ha; dan
 - b.7 Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 70 Ha.
- c. Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 316.383 Ha, meliputi:
 - c.1 Perkebunan Besar meliputi :
 - (a) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 30.808Ha;
 - (b) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 16.590Ha;

- (c) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 4.908Ha;
 - (d) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 4.329Ha;
 - (e) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 35.047Ha;
dan
 - (f) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 33.188Ha.
- c.2 Perkebunan rakyat meliputi :
- (a) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 40.120Ha;
 - (b) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 45.660Ha;
 - (c) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 34.687Ha;
 - (d) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 30.326Ha;
 - (e) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 22.264Ha;
dan
 - (f) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 18.456Ha.
- d. Kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 10.102 Ha, meliputi:
- d.1 Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 791 Ha;
 - d.2 Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 318 Ha;
 - d.3 Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 7.720 Ha;
 - d.4 Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 566 Ha;
 - d.5 Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 467 Ha;
 - d.6 Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 160 Ha; dan
 - d.7 Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 80 Ha.

(3) Kawasan peruntukan perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan dilakukan melalui penetapan kawasan sentra perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap dengan pendekatan minapolitan, menyusun masterplan minapolitan perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap, pengelolaan sumber daya air secara optimal bagi pengembangan perikanan budidaya laut, payau dan tawar, pembangunan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas perikanan budidaya laut, payau dan tawar, penyediaan perlengkapan dan prasarana penunjang untuk peningkatan produktivitas perikanan tangkap (pelabuhan), pengembangan kegiatan pengolahan (industri) perikanan, budidaya laut, payau, tawar dan perikanan tangkap, dan pengembangan kawasan perikanan didukung dengan penyediaan balai budidaya dan laboratorium.

Penetapan kawasan peruntukan perikanan yang memiliki potensi untuk pengembangan, meliputi :

- a. perikanan tangkap dikembangkan di perairan selat Bangka, perairan utara Pulau Bangka dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Cina Selatan, perairan timur Pulau Bangka dan ZEE Laut Cina Selatan, perairan Selat Gelasa dan selatan Pulau Bangka, perairan utara Pulau Belitung dan ZEE Laut Cina Selatan, dan perairan timur Pulau Belitung;
- b. perikanan budidaya yang terdiri dari budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar, dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Pengembangan kawasan perikanan dapat dilakukan dengan pendekatan minapolitan, dan perikanan tangkap yang telah didukung pelabuhan perikanan (2 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dan 18 Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)).

Dilain pihak pengembangan kawasan perikanan budidaya didukung dengan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali seluas 5 Ha, Balai Benih Udang (BBU) Tanjung Krasak seluas 7,5 Ha; dan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Tanjung Rusa 15 Ha.

(4) Kawasan pertambangan

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan eksplorasi bagi pihak yang sudah mendapatkan izin usaha pertambangan eksplorasi, peningkatan status WIUP eksplorasi menjadi WIUP operasi produksi sesuai hasil kajian teknis, memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasi produksi, identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR), memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pertambangan rakyat, dan memfasilitasi dan mengawasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Penetapan kawasan peruntukan pertambangan kawasan darat seluas 357.746 Ha di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota, dengan rician:

- a. Wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi dengan luas 8.879 Ha; dan
- b. Wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi dengan luas 348.867 Ha.

(5) Kawasan industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri dilakukan dengan menetapkan dan menyepakati kawasan-kawasan industri di Kepulauan Bangka Belitung, membangun sistem transportasi terpadu antara darat dan laut untuk mendukung kegiatan industri, membangun instalasi penyediaan air bersih dan air baku untuk kebutuhan industri, penyediaan sumber energi (listrik) dengan mengembangkan energi baru terbarukan dan energi terbarukan, dan mendorong dan memastikan pembangunan atau penyediaan instalasi pengolahan limbah industri secara aman dan ramah lingkungan.

Kawasan peruntukan industri yang telah ditetapkan adalah:

- a. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu Muntok di Kabupaten Bangka Barat;
- b. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu Jelitik dan Teluk Kelabat di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat;
- c. Kawasan industri Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah;
- d. Kawasan industri Ketapang di Pangkalpinang;
- e. Kawasan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
- f. Kawasan industri Besar Badau dan Membalong di Kabupaten Belitung; dan
- g. Kawasan industri Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur.

(6) Kawasan peruntukan pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata dilakukan dengan, identifikasi kawasan potensial dan kawasan wisata yang sudah bertumbuh, penyusunan masterplan (rencana induk pengembangan pariwisata daerah) Kepulauan Bangka Belitung, revitalisasi, restorasi dan perbaikan bangunan dan kawasan wisata yang ada, pengembangan kawasan potensial menjadi kawasan strategis pariwisata provinsi, dan peningkatan aksesibilitas pada kawasan-kawasan pariwisata yang potensial dalam satu kesatuan sistem perjalanan wisata.

Penetapan kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas:

- a. Wisata alam, meliputi seluruh wilayah pantai Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil yaitu:
 - a.1 Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di Kabupaten/Kota, serta kawasan pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur;
 - a.2 Kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata hutan;
 - a.3 Kawasan wisata alam berupa pemandian sumber air panas alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan;
 - a.4 Taman wisata laut;
 - a.5 Kawasan Strategis Pariwisata Tanjung Kelayang; serta
 - a.6 Kawasan pariwisata alam unggulan lainnya di Kabupaten/Kota.
- b. Wisata budaya, wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - b.1 Kawasan Kota Tua Muntok di kabupaten Bangka Barat;
 - b.2 Situs Kota kapur di Kabupaten Bangka;
 - b.3 Kawasan yang di dalamnya terdapat cagar budaya dan atau yang memiliki ciri-ciri cagar budaya di kabupaten/kota;
 - b.4 Kawasan wisata budaya yang memiliki daya tarik wisata budaya tangible maupun intangible yang ada di kabupaten/kota;
 - b.5 Kawasan budaya Laskar Pelangi di Kabupaten Belitung Timur; dan
 - b.6 Kawasan wisata budaya dan wisata kreatif lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi di kabupaten/kota.
- c. Wisata buatan adalah kawasan wisata yang didalamnya terdapat daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya, yang meliputi kawasan agro wisata, fasilitas rekreasi dan taman bertema, resort serta fasilitas olahraga yang ada di kabupaten/kota.

(7) Kawasan peruntukan permukiman

Perwujudan kawasan peruntukan permukiman dilakukan dengan cara penetapan kawasan permukiman perkotaan maupun perdesaan, penyusunan rencana strategis dan pengembangan perumahan dan infrastruktur kota, penyusunan masterplan perencanaan kota yang ditetapkan, identifikasi dan perbaikan perumahan yang rusak.

Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan luas kurang lebih 59.188 (lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan) Ha, meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang dikembangkan di seluruh wilayah provinsi yang memenuhi kriteria sebagai permukiman.

(8) Kawasan peruntukan lainnya

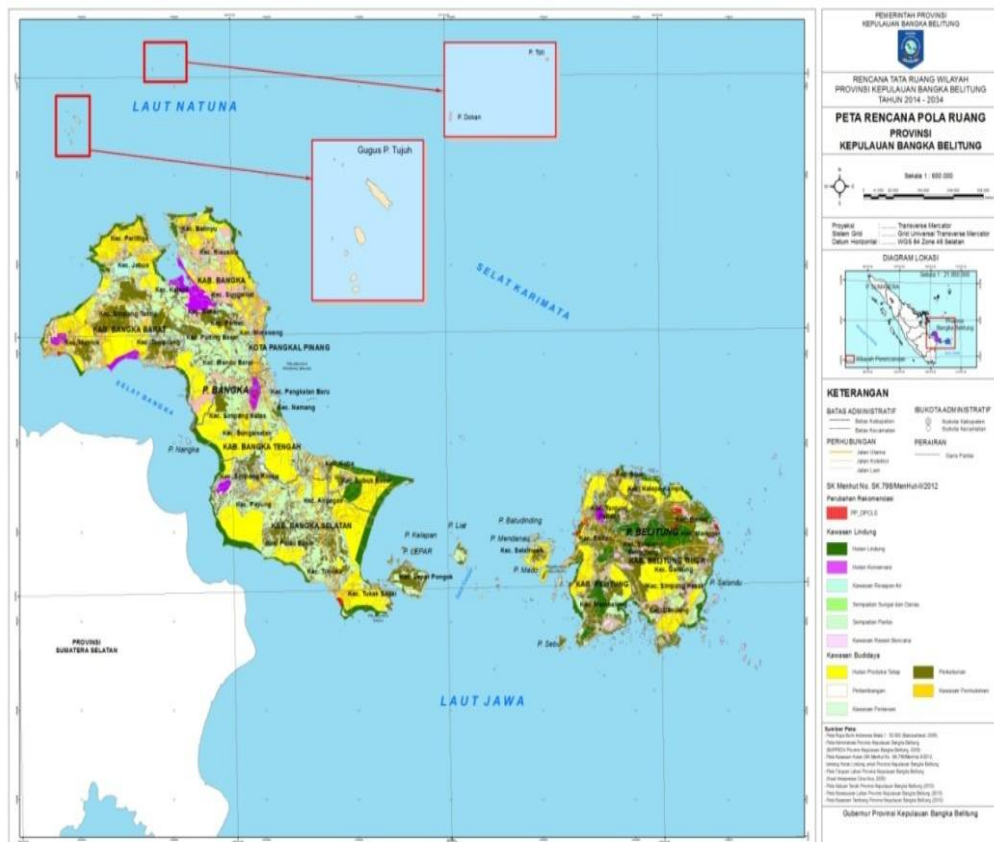
Rencana pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis berupa kawasan andalan yang ditetapkan secara nasional meliputi:

- Kawasan Bangka dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, pariwisata, dan perikanan;
- Kawasan Belitung dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata dan pertambangan;
- Kawasan laut Bangka dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata; dan
- Kawasan taman wisata alam laut perairan Belitung dan Bangka.

Semua kawasan peruntukan ini telah dipetakan kedalam pola ruang Gambar I.1 dan Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Gambar I.2.

Gambar I.1

Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Gambar I.2

Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hasil proyeksi penduduk pada tahun 2017 sebesar 1.430.865 orang, dengan laju pertumbuhan 2016-2017 sebesar 2,07 persen. Dalam kurun waktu 2013-2017, jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertambah sebesar 115.742 orang atau mengalami pertumbuhan sebesar 8,80 persen. Selain faktor natalitas dan mortalitas, faktor lain yang mendorong tingginya pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah tingginya angka migrasi. Tingginya migrasi ke Bangka Belitung disebabkan karena berkembangnya sektor pariwisata yang diindikasikan dengan meningkatnya tenaga kerja yang bekerja pada sektor perdagangan, jasa dan restoran.

Tabel I.2

Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014–2018

Kabupaten /Kota	Penduduk (jiwa)				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	304.485	311.085	317.735	324.305	330.793
Belitung	171.271	175.048	178.721	182.418	186.155
Bangka Barat	192.395	196.598	200.684	204.778	209.011
Bangka Tengah	177.218	180.903	184.720	188.603	192.429
Bangka Selatan	189.492	193.583	197.670	201.782	205.901
Belitung Timur	117.026	119.394	121.971	124.587	127.064
Pangkalpinang	191.994	196.202	200.326	204.392	208.520
Kepulauan Bangka Belitung	1.343.881	1.372.813	1.401.827	1.430.865	1.459.873

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

Pada tahun 2014 penduduk Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 1.343.881 jiwa dan meningkat menjadi 1.449.873 pada tahun 2018. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya angka kelahiran (natalitas), namun juga dikarenakan semakin tingginya angka harapan hidup sehingga tingkat kematian (mortalitas) menjadi menurun serta adanya faktor migrasi.

E. KONDISI EKONOMI

a. Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan potensi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

1. Potensi Pertanian

Potensi sektor pertanian yang dapat dikembangkan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah durian, jeruk, nanas, cempedak, manggis, duku, salak, rambutan, dan pisang. Dari sektor perkebunan, potensi perkebunan yang dapat dikembangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain lada, kelapa sawit, karet, cengkeh, dan coklat. Adapun luasan lahan yang secara eksisting dan potensi yang diperuntukkan untuk pengembangan sektor pertanian, adalah sebagaimana disajikan pada tabel I.3.

Tabel I.3

Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis Penggunaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penggunaan Lahan		Luas (Ha)
(1)		(2)
I.	LAHAN PERTANIAN	1.173.412
I.1.	Lahan Sawah	25.093
	a. Irigasi	4.966
	b. Tadah hujan	17.181
	c. Pasang surut	390
	d. Lebak	2.556
I.2.	Lahan Bukan Sawah	1.148.319
	a. Tegal	97.930
	b. Ladang	30.416
	c. Perkebunan	394.408
	d. Hutan rakyat	43.661
	e. Pengembalaan	3.232
	f. Sementara tidak diusahakan	59.174
	g. Lain-lain	519.497

Penggunaan Lahan		Luas (Ha)
(1)		(2)
II.	LAHAN BUKAN PERTANIAN	490.607
	a. Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll	490.607
	Jumlah	1.664.018

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2019

Potensi lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat besar untuk pengembangan kawasan pertanian, sebagai contoh terdapat lahan yang tidak diusahakan sebesar 3,55% dari potensi yang ada dan masih terdapat lahan lainnya yang juga belum dimanfaatkan sebesar 23%. Gambaran tersebut berarti bahwa upaya pengembangan pembangunan sektor pertanian masih sangat dimungkinkan melalui perluasan areal tanam dengan penambahan bahan baku lahan dan optimalisasi lahan yang ada.

2. Potensi Kehutanan

Berdasarkan fungsi kawasan hutan, luas hutan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 tercatat 654.561,34 Ha yang terdiri dari 432.883,52 Ha Hutan Produksi, 185.531,34 Ha Hutan Lindung, 35.453,89 Ha Hutan Konservasi dan 692,59 Ha Hutan Produksi Konversi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel I.4.

Tabel I.4
Luas Hutan Tahun 2013 s.d 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Luas Kawasan Hutan	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)	2017 (Ha)	2018 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hutan Produksi	432.882,82	432.882,82	432.882,82	436.647,89	436.647,89
Hutan Lindung	189.965	189.965	189.965	184.276,95	184.276,93
Hutan Konservasi	35.473	35.473	35.473	35.750,84	35.750,84
Hutan Produksi Konversi	692,58	692,58	692,58	692,58	692,58
Jumlah	659.014,58	659.014,58	659.014,58	657.378,26	657.378,26

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

Potensi Kepulauan Bangka Belitung terhadap komoditas sektor kehutanan adalah: meranti, ramin, membalong, mandaru, kerangas, kapuk, jelutung, pulai, mahang, gelam, bakau, madu alam dan rotan.

3. Potensi Kelautan, Pesisir dan Perikanan

Wilayah Kepulauan Bangka Belitung menyimpan dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar, baik perikanan pantai maupun perikanan laut. Kondisi desa-desa pantai di wilayah ini di sepanjang pantainya merupakan alam yang memiliki karakteristik pantai berpasir, pantai berlumpur, pantai berbatu, mangrove, hutan pantai, semak belukar dan permukiman.

Pantai berpasir umumnya dikembangkan sebagai daerah wisata terutama disebabkan keindahan alam yang diselingi oleh batu granit. Desa pantai berlumpur terutama yang berada di muara dan disebabkan oleh buangan limbah pertambangan dan perkebunan. Sedangkan desa pantai yang dihiasi oleh hutan mangrove merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya ikan, udang, kepiting dan berbagai biota laut lainnya.

Adapun potensi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat terlihat pada tabel I.5.

Tabel I.5
Potensi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2018

No.	Uraian	Potensi Produksi (Ton)					Produksi Tahun (Ton)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Perikanan Tangkap	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	203.284,40	139.632,96	196.704,00	208.019,7	228.524,71
2.	Perikanan Budidaya	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	4.198,62	4.305,29	4.618,87	3.844,97	9.340,93

Sumber : Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

a) Perikanan Budidaya

Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2018 tercatat sebesar 9.340,93 ton. Produksi ini naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3.844,97 ton. Kenaikan produksi budidaya pada tahun 2017 disumbangkan oleh produksi udang vannamei, rumput laut dan kerang-kerangan.

b) Perikanan Tangkap

Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam skala nasional cukup besar hal ini dikarenakan luas wilayah laut Bangka Belitung yang mencapai 65,501 km² atau 80 % dari total wilayah daratan dengan panjang pantai 1,295.83 km. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) termasuk dalam WPP 711 Laut Cina Selatan yang potensinya mencapai 1,059,000 ton/tahun (sumber : KEP MEN KP Nomor : KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi potensi sumberdaya Ikan pada masing-masing wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia).

Berdasarkan data statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018, jumlah produksi perikanan tangkap di laut sebesar 228.524,71 ton dan mengalami kenaikan dari produksi perikanan tangkap pada tahun 2017 sebesar 208.019,7 Ton dimana jumlah produksinya 196.704,00 ton. Hal ini menunjukkan sektor perikanan tangkap juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melihat sektor perikanan tangkap yang cukup besar dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat Bangka Belitung, maka sektor perikanan tangkap diharapkan terus berkembang dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan tetap berlandaskan penangkapan secara lestari dan berkelanjutan.

4. Potensi Pertambangan

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah, keberhasilan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan di bidang pertambangan dan energi, terwujudnya pembangunan di bidang pertambangan dan energi juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Pertambangan dan Energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait. Untuk kekurangan energi listrik Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung telah mendorong pihak PT. PLN Persero untuk melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x30 Megawatt di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan 2 x 16,5 MW di Suge Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006.

Sementara itu, pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung, meskipun produksi pertambangan itu sendiri semakin berkurang saat ini, namun potensi yang dimiliki masih cukup besar. Selain pertambangan timah, juga terdapat beberapa potensi pertambangan lainnya di Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana ya tersaji pada tabel I.9 berikut.

Tabel I.6

Potensi Bahan Galian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	JENIS BAHAN GALIAN	POTENSI
(1)	(2)	(3)
1	Pasir Kwarsa	1.482.301 ton
2	Pasir Bangunan	666.188,06 ton
3	Kaolin	205.487,50 ton
4	Granit	55.508,29 m3
5	Diabas	89.551,12 m3

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

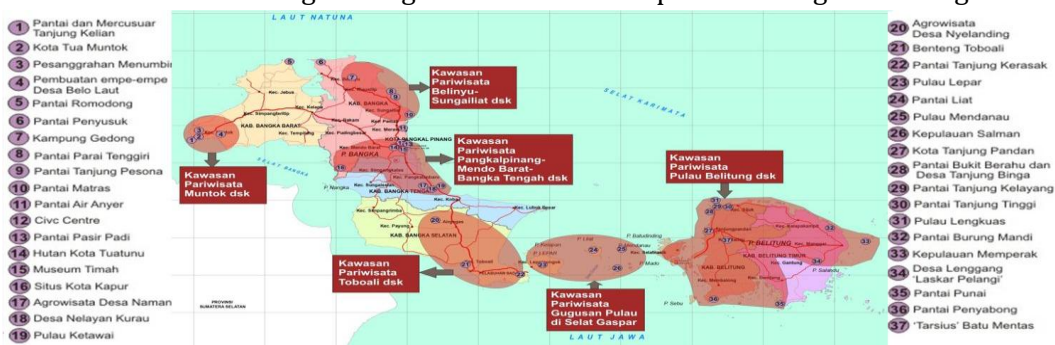
5. Potensi Pariwisata

Bangka Belitung sejak tahun 2010 telah ditetapkan sebagai daerah kunjungan wisata bahari ketiga di Indonesia setelah Bali dan Lombok. Selain itu, sejak tahun 2011, melalui PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, telah menetapkan Kawasan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Hal ini menunjukkan bahwa kepariwisataan di Kepulauan Bangka Belitung telah mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Selain dikarenakan memiliki potensi wisata yang baik, secara geografis juga mendukung Bangka Belitung sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia.

Gambaran mengenai potensi pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana disajikan pada gambar I.3 berikut.

Gambar I.3

Potensi Pengembangan Pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Hambatan yang ada pada urusan kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain belum sinkronnya antara struktur organisasi Perangkat Daerah dengan kewenangan yang dimilikinya, khususnya pada kewenangan di bidang pariwisata di mana secara ideal meliputi 4 (empat) hal yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan. Sementara struktur yang ada hanya menyediakan tugas dan fungsi untuk pemasaran dan kelembagaan, sementara fungsi untuk destinasi dan industri belum mendapat porsi sebagaimana seharusnya. Akibatnya indikator kinerja menjadi tidak jelas, sehingga terjadi tumpang tindih dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Akibatnya Perangkat Daerah tidak dapat melaksanakan pelayanan secara optimal. Kurangnya dikenalnya beberapa wisata di beberapa lokasi di kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang telah maju kepariwisataannya turut mempengaruhi kecilnya minat wisatawan untuk berkunjung, disamping juga faktor jarak tempuh dari kota serta fasilitas penunjang kepariwisataan. Selain itu masih terbatasnya kemampuan SDM kepariwisataan juga merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata.

Tabel I.7

Kunjungan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Jumlah Wisatawan Dalam Negeri	369.743	465.554	460.236	362.279	417.818
2.	Jumlah Wisatawan Luar Negeri	3.020	4.690	6.613	7.143	8.124
3.	Jumlah	372.763	470.244	466.876	369.422	425.942

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

Sesuai dengan kategori wisatawan yang dikeluarkan oleh BPS, dimana wisatawan di bagi menjadi 2 jenis yaitu wisatawan Dalam Negeri dan wisatawan luar negeri. Jumlah wisatawan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 6 (enam) tahun terakhir cenderung meningkat dan itu sangat bagus karena dapat meningkatkan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2014 jumlah wisatawan sebanyak 372.763 orang meningkat di tahun 2018 menjadi 425.942 orang.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB digunakan sebagai dasar perhitungan

laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dan disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Perkembangan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang Tahun 2016-2018 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel III.1 menunjukkan trend yang meningkat. Secara nominal PDRB pada Tahun 2016 sebesar Rp47.848.372 juta, meningkat menjadi sebesar Rp49.986.847 juta pada Tahun 2017 dan pada Tahun 2018 menjadi sebesar Rp52.212.088.

Tabel I.8

**PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2018 (juta rupiah)**

Lapangan Usaha		2016	2017	2018
(1)		(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.123.187	9.089.992	9.588.864
B	Pertambangan dan Penggalian	6.490.563	6.634.752	6.562.956
C	Industri Pengolahan	10.680.473	11.345.075	11.803.244
D	Pengadaan Listrik dan Gas	43.742	45.864	49.274
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.567	9.406	8.879
F	Konstruksi	4.021.606	4.248.461	4.493.147
G	Perdagangan Besar dan Eceran Motor	6.727.660	7.253.257	7.445.122
H	Transportasi dan Pergudangan	1.752.264	1.892.222	2.021.344
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.086.468	1.136.527	1.207.181
J	Informasi dan Komunikasi	926.926	1.002.849	1.110.309
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	859.981	881.273	936.324
L	Real Estate	1.494.629	1.572.154	1.702.532
M, N	Jasa Perusahaan	120.419	127.462	135.984
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.478.742	2.604.173	2.843.213
P	Jasa Pendidikan	1.139.292	1.183.252	1.289.760
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	559.444	605.202	632.789
R, S, T, U	Jasa Lainnya	334.409	354.926	381.166
PDRB		47.848.372	49.986.847	52.212.088

Sumber: 2016-2018 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

Dilihat dari perkembangan sektoral, kecuali sektor pertambangan dan penggalian dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, hampir seluruh sektor PDRB mengalami peningkatan. Sektor informasi dan komunikasi yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB, dari Rp1.002.849 juta pada Tahun 2017, meningkat menjadi Rp1.110.309 juta pada Tahun 2018 diikuti oleh sector Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dari Rp2.604.173 juta pada Tahun 2017 meningkat menjadi Rp2.843.213 juta pada Tahun 2018.

Tahun 2018 sektor dengan kontribusi PDRB terbesar diperoleh dari sector industry pengolahan sebesar Rp11.803.244 juta, diikuti sector pertanian, kehutanan, dan perikanan Rp9.588.864 juta, sector perdagangan besar dan eceran Rp7.445.122 juta, dan sector pertambangan Rp6.562.956 juta. Kontribusi keempat sector tersebut sebesar Rp35.400.186 juta atau sebesar 67,8%. Kontribusi sektor lainnya sebesar Rp16.811.902 juta atau sebesar 32,2%.

Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan dari sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor pertambangan dan penggalian sehingga sektor-sektor ekonomi lainnya sebagai pendukung dan perkembangan serta kemajuannya sangatlah ditentukan oleh perkembangan dan kemajuan dari keempat sektor dominan.

Sementara itu, dilihat dari nilai nominal PDRB berdasarkan pengeluaran atau penggunaan yang menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah (region) digunakan atau dimanfaatkan, baik untuk memenuhi kebutuhan permintaan di dalam wilayah maupun untuk memenuhi kebutuhan di luar wilayah sepanjang Tahun 2016-2018 juga menunjukkan peningkatan. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel III.2 dapat dijelaskan bahwa komponen pengeluaran pembentuk PDRB masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, di mana pada Tahun 2016 sebesar Rp25.027.249 juta rupiah meningkat menjadi sebesar Rp26.300.217 juta pada Tahun 2017 dan sebesar Rp27.794.140 juta pada Tahun 2018.

Komponen pengeluaran terbesar kedua yang berkontribusi terhadap PDRB adalah ekspor, namun sejalan dengan penurunan harga komoditas ekspor di pasar dunia seperti karet dan CPO memberikan dampak negatif terhadap perkembangan ekspor Kepulauan Bangka Belitung, di mana pada Tahun 2016 nilai ekspor mencapai sebesar Rp19.416.749 juta menurun menjadi sebesar Rp25.592.322 juta pada Tahun 2017, namun menurun menjadi sebesar Rp25.021.253 juta pada Tahun 2018.

Tabel I.9
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2018 (Juta rupiah)

	Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*)	2020*)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	25.027.249	26.300.217	27.794.140	29.402.381	30.730.837
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	302.278	319.466	345.741	365.216	392.460
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.868.523	5.030.469	5.119.335	5.347.394	5.684.683
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	10.450.945	11.111.056	11.779.865	12.526.294	13.095.276
5	Perubahan Inventori	509.575	341.149	389.331	414.272	439.281
6	Ekspor Luar Negeri	19.416.749	25.592.322	25.021.253	25.385.049	26.827.887
7	Impor Luar Negeri	2.091.352	1.414.959	2.007.892	2.655.109	3.127.145
8	Net Ekspor Antar Daerah	(10.635.595)	(17.292.873)	(16.229.685)	(16.276.512)	(17.082.529)
	PDRB	47.848.372	49.986.847	52.212.088	54.508.985	56.960.750

Sumber: 2016-2018 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

Untuk komponen investasi (dilihat dari nilai pembentukan modal tetap bruto) secara nominal juga mengalami peningkatan sepanjang periode Tahun 2016-2018, yaitu masing-masing sebesar Rp10.450.945 juta pada Tahun 2016, sebesar Rp11.111.056 juta pada Tahun 2017 dan sebesar Rp11.779.865 juta pada Tahun 2018. Sejalan dengan peningkatan komponen investasi, komponen konsumsi pemerintah juga mengalami peningkatan sepanjang periode yang sama, yaitu sebesar Rp4.868.523 juta pada Tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp5.030.469 juta pada Tahun 2017 dan kembali meningkat menjadi sebesar Rp5.119.335 juta pada Tahun 2018.

Pada Tahun 2019 dan 2020 diperkirakan konsumsi rumah tangga dan investasi masih terus menguat, hal ini diindikasikan dengan masih kuatnya tingkat keyakinan konsumen dan pelaku usaha yang masih terlihat optimisme. Peningkatan harga beberapa komoditi unggulan pada Tahun 2019 dan 2020 diperkirakan akan terjadi, sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan ekspor *rowmaterials* sumber daya mineral, juga berdampak positif terhadap investasi di Kepulauan Bangka Belitung. Di samping itu, potensi sumber daya alam yang melimpah juga menjadi salah satu daya tarik investasi, sehingga dengan adanya penambahan kapasitas kegiatan produksi dan bisnis akan memperkuat konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi, ekspor diperkirakan juga akan mengalami kenaikan seiring dengan membaiknya perekonomian dunia. Penjualan beberapa komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2019 dan 2020 diperkirakan mulai tumbuh secara positif. Untuk memperkuat perkembangan beberapa komponen pengeluaran tersebut, pengendalian terhadap neraca perdagangan juga harus dilakukan dengan menjaga aktivitas impor lebih rendah dari pada ekspor.

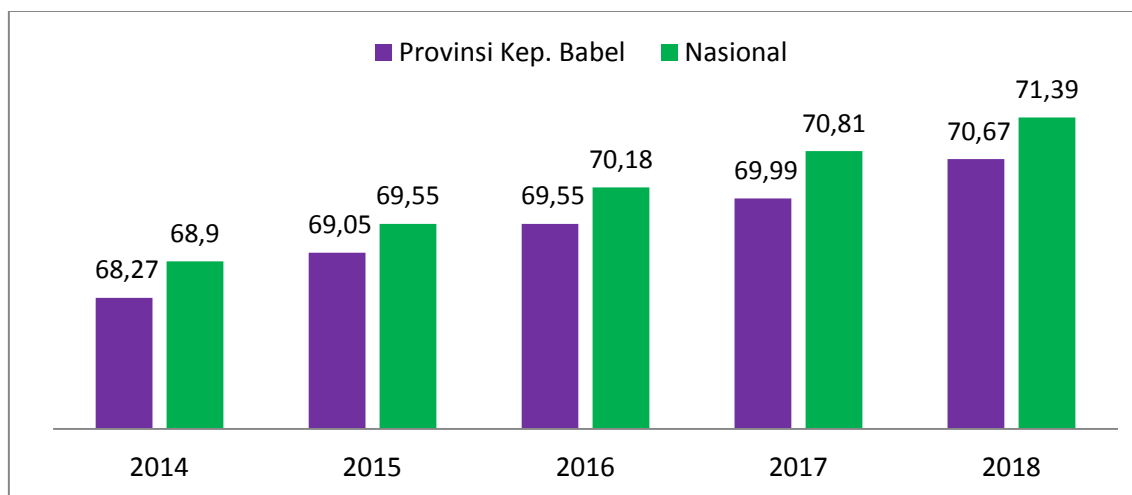
F. INDIKATOR KINERJA MAKRO

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Berikut ini gambar I.5 merupakan data capaian IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2018 yang disandingkan dengan capaian IPM Nasional Tahun 2016-2018 dengan kecenderungan capaian yang terus meningkat tiap tahunnya.

Gambar I.4
Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2018
(dalam Rupiah)



Sumber : 2014-2018 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

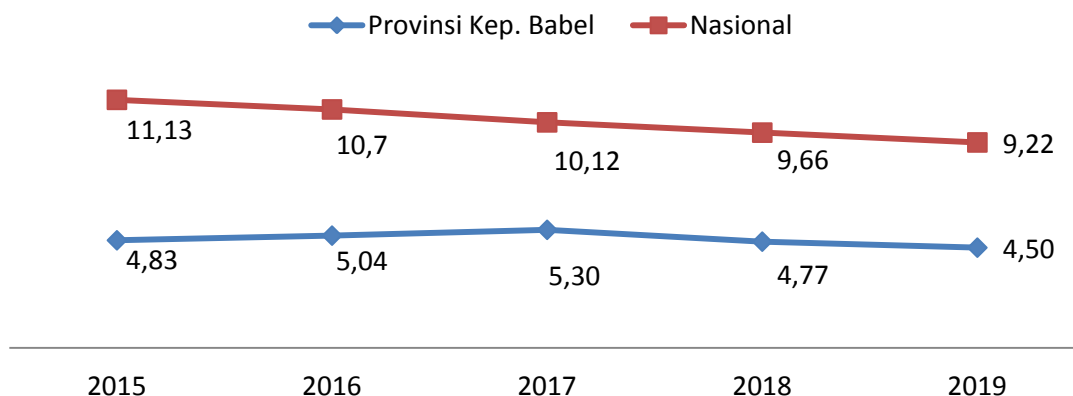
b. Angka Kemiskinan

Dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basicneedsapproach*), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan dinyatakan sebagai penduduk miskin atau persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

Penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode tahun 2015 - 2019 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebanyak 4,83 persen dari total jumlah penduduk, turun menjadi 4,50 persen pada tahun 2019.

Gambar I.5

Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 – 2019
(dalam persen)

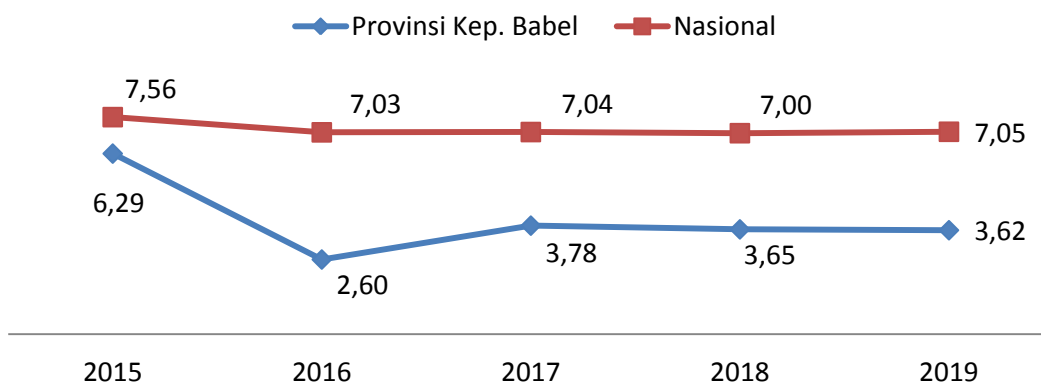


Sumber : 2015 – 2019 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung

c. Angka Pengangguran

Persentase pengangguran terbuka (TPT) pada Tahun 2018 sebesar 3,65 persen. Mengalami penurunan sebesar 0,13 persen dari kondisi Tahun 2017 yang semula berada di angka 3,78. Sedangkan pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 3,62. Angka pengangguran diperkirakan dapat ditekan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui upaya penciptaan peluang lapangan pekerjaan dan usaha diarahkan untuk menciptakan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja diharapkan akan berdampak pada penyerapan angkatan kerja. Demikian juga pertumbuhan sektor pertanian, pariwisata, kelautan serta membaiknya infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan listrik akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap peningkatan angkatan kerja.

Gambar I.6
Pengangguran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 – 2019
(dalam persen)

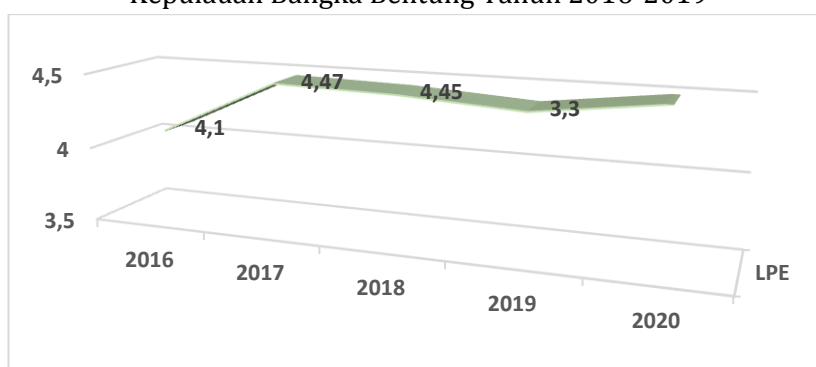


Sumber : 2015 – 2019 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung

d. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi yang paling mendasar dan digunakan sampai saat ini. Umumnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan perubahan atau kenaikan PDRB, yaitu keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam satu tahun. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode Tahun 2016-2019 sebagaimana diperlihatkan pada gambar I.7 berfluktuasi, dimana pada Tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 4,47 persen meningkat dari Tahun 2016 sebesar 4,1 persen dan melambat menjadi sebesar 4,45 persen pada Tahun 2018 serta 3,3 pada tahun 2019.

Gambar I.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2019



Sumber : 2016-2019 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

Struktur perekonomian Kepulauan Bangka Belitung menurut lapangan usaha tahun 2019 didominasi oleh lima lapangan usaha utama yakni Industri

Pengolahan (19,59 persen), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (17,94 persen), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,79 persen), Konstruksi (10,37 persen) serta Pertambangan dan Penggalan (9,49 persen).

Tabel I.10

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 – 2019

	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,27	-0,36	5,49	2,89
B.	Pertambangan dan Penggalan	0,51	2,19	(1,08)	0,87
C.	Industri Pengolahan	2,77	6,31	4,04	1,17
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	12,44	4,85	7,44	6,55
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,52	9,79	(5,60)	3,41
F.	Konstruksi	6,95	5,73	5,76	7,08
G.	Perdagangan Besar dan Eceran Motor	5,08	7,91	2,65	1,76
H.	Transportasi dan Pergudangan	5,41	7,99	6,82	2,23
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,99	4,61	6,22	9,62
J.	Informasi dan Komunikasi	9,18	8,19	10,72	13,78
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,44	2,48	6,25	4,97
L.	Real Estate	3,67	5,20	8,29	1,36
M, N.	Jasa Perusahaan	0,06	5,85	6,69	1,26
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,06	5,06	9,18	8,13
P.	Jasa Pendidikan	7,59	3,86	9,00	7,11
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,82	8,19	4,56	10,19
R, S, T, U	Jasa Lainnya	9,79	6,14	7,39	10,83
	PDRB	4,11	4,51	4,45	3,32

Sumber : 2016-2019 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

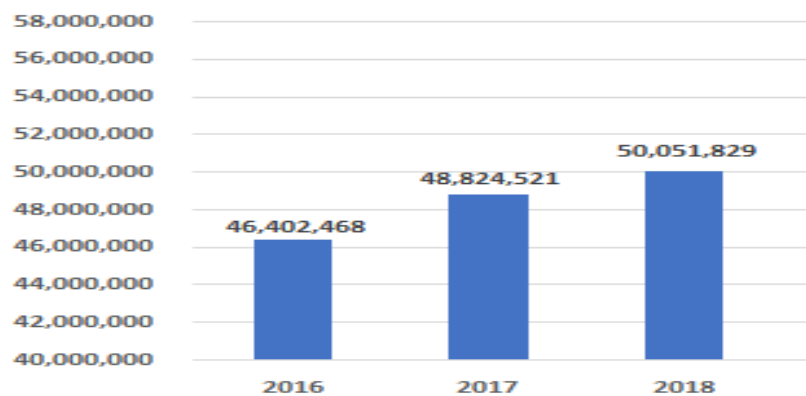
e. Pendapatan Per Kapita

PDRB perkapita adalah gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel diatas.

Dalam kurun waktu 2016-2018, sebagaimana diperlihatkan pada gambar I.4 PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016, PDRB perkapita sebesar Rp46.402.468,- meningkat menjadi sebesar Rp48.824.521,- pada Tahun 2017 dan menjadi sebesar Rp50.051.829,- pada Tahun 2018. Sejalan dengan perkembangan

perekonomian daerah yang tumbuh positif, PDRB perkapita pada Tahun 2019-2020 diperkirakan akan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp53.015.000,- dan sebesar Rp55.401.000,-.

Gambar I.7
PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2016-2018
(dalam Rupiah)



Sumber : 2016-2018 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

f. Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)

Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan pada table I.11, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2014 sebesar 0,295 hingga tahun 2019 sebesar 0,262. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kecenderungan relatif rendah dimana semakin mendekati 0 distribusi pendapatan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin merata.

Tabel I.11
Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2014–2019)

Tahun	Koefisien Gini
(1)	(2)
2014	0,295
2015	0,275
2016	0,288
2017	0,276
2018	0,272
2019	0,262

Sumber: 2013-2019 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung 2019

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah:

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Ada lima makna terhadap pernyataan visi tersebut yang dijelaskan sebagai berikut:

1. ***Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. ***Sejahtera*** menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. ***Maju*** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. ***Unggul*** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.
5. ***Teknologi*** dimaknai dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi.

2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017–2022, yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. ***Pembangunan ekonomi*** adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan

perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah perkapita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

- b. **Berbasis potensi daerah** adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang difokuskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan sesuai dengan potensi daerah.

2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. **Infrastruktur** adalah pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas
- b. **Konektivitas daerah** adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Sumber daya manusia** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. **Unggul dan handal** adalah mempunyai tingkat pendidikan yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan mempunyai daya saing yang tinggi.

4. Meningkatkan kesehatan masyarakat ;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

Kesehatan Masyarakat adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Tata Kelola Pemerintahan yang baik** adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
- b. **Pembangunan demokrasi** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Pengendalian bencana** adalah mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana
- b. **Kualitas lingkungan hidup** adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Keselarasan antara tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan indikator sasaran dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Misi I : Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator kinerja Tujuan :
 - a. Meningkatnya Persentase pertumbuhan PDRB, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan
 - Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan
 - Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata dengan indikator kinerja sasaran Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara
 - Meningkatnya Produksi sektor pertambangan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian
 - Meningkatnya pembangunan berbasis industri dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan
 - Terwujudnya kemandirian energi dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor ketenagalistrikan.
2. Meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat dengan indikator tujuan sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran pemerintah perkapita yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya belanja pemerintah daerah dengan indikator kinerja sasaran Persentase pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah
 - b. Pendapatan perkapita masyarakat yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:

- Menurunnya angka Pengangguran dengan indikator kinerja sasaran Persentase Angka Pengangguran
- Menurunnya angka kemiskinan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Angka Kemiskinan
- Menurunnya angka Inflasi dengan indikator kinerja sasaran Angka Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan indikator kinerja sasaran Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk

Misi II : Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah dengan indikator tujuan Persentase Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Terbangunnya Daerah Irigasi (ha)
 - Ketersediaan Air Baku (M3)
 - Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi
 - b. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Persentase akses jalan lingkungan yang memadai
 - Persentase kawasan permukiman yang tertata
 - Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi
 - c. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut
 - Persentase armada pengangkutan
 - Persentase jalan kondisi mantap

Misi III : Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan Pendidikan Masyarakat dengan indikator tujuan Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Angka harapan lama sekolah (Angka harapan lama sekolah, Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)

Misi IV : Meningkatkan kesehatan masyarakat, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator tujuan Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Angka Kesehatan Masyarakat.

Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas dengan indikator tujuan Pertumbuhan Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan
 - Tingkat kematangan Maturitas SPIP
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat
 - Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat
 - b. Birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Indeks Profesionalitas ASN
 - Nilai rata-rata delapan area perubahan
 - c. Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (KSM)
 - Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Terwujudnya pembangunan demokrasi dengan indikator tujuan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Skor aspek kebebasan sipil
 - Skor aspek hak-hak politik
 - Skor aspek lembaga demokrasi

Misi VI : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola kebencanaan dengan indikator tujuan Indeks Resiko Bencana (IRB), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana dengan indikator kinerja sasaran Indeks kapasitas Bencana Daerah.
2. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup [IKLH], yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan dengan indikator kinerja sasaran Indeks kapasitas daerah sasaran sebagai berikut:
 - Indeks Air
 - Indeks Udara
 - Indeks Tutupan Lahan
 - Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, refosmasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan strategi adalah langkah-langkah atau cara dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi dan arah kebijakan yang digunakan dalam mencapai sasaran pembangunan antar lain sebagai berikut :

a) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah pertanian berkelanjutan dengan arah kebijakan Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
2. Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan;
 - b. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian
 - c. Pembinaan hubungan industri sektor pertanian
 - d. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian
 - e. Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah.
3. Pengembangan kawasan berbasis pertanian, perkebunan dan peternakan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang
 - b. Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung
 - c. Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas
 - d. Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian dan peternakan

b) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya produksi Meningkatkan produksi Sub Sektor perikanan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan arah kebijakan Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan
 - b. Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan
 - c. Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan
 - d. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan
 - e. Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan.
3. Mengembangkan kawasan sentra Kelautan dan Perikanan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok
 - b. Pengembangan Kawasan strategis Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
 - c. Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok
 - d. Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik
 - e. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga
 - f. Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar

c) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan pariwisata dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif , peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata
 - b. Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.
 - c. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah
 - d. Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, peningkatan budaya, prestasi kepemudaan serta olah raga dalam mendukung pembangunan kepariwisataan
 - e. Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata
 - f. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan

- g. Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.
- 2. Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian
 - b. Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang
 - c. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka
 - d. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang
 - e. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok
 - f. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba
 - g. Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung
 - h. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing
- 3. Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan
 - a. Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera
 - b. Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil

d) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Produksi sektor pertambangan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral.
- b. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk sumber daya mineral.
- c. Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral.
- d. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertambangan khususnya sektor sumber daya mineral.
- e. Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral.

e) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya pembangunan berbasis industri dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular
- b. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)

- c. Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat
- d. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai
- e. Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
- f. Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri

f) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Terwujudnya kemandirian energi dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik daerah dengan arah kebijakan Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;

g) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya belanja publik pemerintah dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan arah kebijakan Peningkatan potensi penggalian sumber-sumber Pendapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.

h) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Menurunnya angka Pengangguran dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Meningkatkan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penciptaan peluang kesempatan kerja
- b. Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan

i) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Menurunnya angka kemiskinan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin

j) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Menurunnya angka Inflasi dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi
- b. Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi.

k) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dengan arah kebijakan Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang

l) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur pertanian dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern
2. Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku

m) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat
2. Meningkatkan penataan kawasan permukiman dengan arah kebijakan Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi
3. Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat.

n) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya konektivitas antar wilayah dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan
2. Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung jalan dan terminal
3. Meningkatkan aksesibilitas dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan

o) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat dengan arah kebijakan peningkatan akses pelayanan pendidikan
2. Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. peningkatan mutu layanan pendidikan.
 - b. Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal
 - c. Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral

p) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan
- b. peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
- c. Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
- d. Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza

q) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Birokrasi yang bersih dan akuntabel dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah dengan arah kebijakan Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran
2. Peningkatan tata kelola pengawasan dengan arah kebijakan Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel
3. Meningkatkan manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja dengan arah kebijakan Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
4. Meningkatkan manajemen pelaksanaan urusan pemerintah daerah dengan arah kebijakan Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan
5. Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan dengan arah kebijakan Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa dengan arah kebijakan Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa

r) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Birokrasi yang efektif dan efisien dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
 - b. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan
2. Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah dengan arah kebijakan Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur

s) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien
- b. Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa
- c. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,
- d. Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.
- e. Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
- f. Menjamin hak anak dalam pembangunan

t) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Menciptakan iklim berdemokrasi yang kondusif dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat
 - b. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)
2. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan arah kebijakan Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat
3. Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi dengan arah kebijakan Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi

u) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana dengan arah kebijakan Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam
 - b. Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur.

v) Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas air dengan arah kebijakan Pengendalian kualitas air
2. Meningkatkan kualitas Udara dengan arah kebijakan pengendalian kualitas udara
3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan tutupan lahan
 - b. Pengembangan Perhutanan Sosial

4. meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
 - b. Pengembangan kawasan TPA Regional

C. PRIORITAS DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang di fokuskan kepada pencapaian visi misi RPJMD 2017-2022, yang dalam implementasinya akan dijabarkan oleh setiap Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Di dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah dalam bentuk program dan kegiatan atau dalam bentuk bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang langsung mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai muara terakhir dari setiap tujuan pembangunan yang dilakukan. Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN

Fokus kegiatan Memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangka Mengembalikan lada sebagai produk agrobisnis andalan Bangka Belitung sehingga kejayaan Babel sebagai-Provinsi Lada bisa dicapai kembali; Membangun pusat penelitian dan pengembangan rekayasa lada maupun produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di Provinsi Bangka Belitung; Memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk pertanian (khususnya lada) dengan kualitas unggul; Memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal.

2. PEMBANGUNAN BAHARI

Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayan-nelayan Babel, demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk; Mendukung pelaku usaha sektor bahari untuk mengembangkan sektor usaha yang ramah lingkungan.

3. PENGEMBANGAN PARIWISATA

Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional melalui event-event seni - budaya atau olahraga bernuansa bahari level nasional/internasional seperti, Festival Budaya Melayu, Festival Kuliner Bangka-Belitung, Karnaval Budaya serumpun Sebalai, Triathlon, Maraton, dll; Rebranding pantai-pantai di Babel melalui desain PR yang menarik seperti cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut dibanding lainnya; Memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun bisnis pariwisatanya di Bangka Belitung melalui pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air, internet, dll) secara memadai demi pengembangan konsep *waterfront city*.

4. PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN

Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus pengelolaan yang dibagi secara proporsional dan berkelanjutan. Menimbang tambang konvensional dan Tambang Rakyat menjadi pemasukan Utama bagi Bangka Belitung. Maka zonasi bagi wilayah penambangan Rakyat (WPR) perlu diwujudkan dan diawasi secara cermat; pembayaran dan pengelolaan CSR Timah secara terpadu dan berkeadilan bagi seluruh perusahaan timah yang beroperasi. Sehingga, pemanfaatannya lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap bencana.

5. PENINGKATAN PENDAPATAN PEMERINTAH

Fokus kegiatan menggali sumber-sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari seluruh sektor yang ada di setiap perangkat Daerah dan meningkatkan pendapatan dari BUMD serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

6. PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT

Fokus kegiatan Mengembangkan bisnis UMKM di Bangka Belitung agar tetap kompetitif di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Bantuan Promosi (Gelar Pameran UMKM), temu investor atau buyer (Business Gathering), dan pendampingan pelatihan kapasitas UMKM (Training); Memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit pengembangan usaha; Melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern; Pendirian dan Optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani dan pedagang kecil untuk mencegah penghisapan para tengkulak dan rentenir

7. PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN

Fokus kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, jalan penghubung antar Kabupaten yang menjadi tanggung jawab Gubernur harus dibangun dengan kondisi baik sehingga arus barang, jasa dan manusia bisa optimal; Pembangunan pelabuhan Batu Beriga dan jembatan penghubung antara pulau Bangka-Belitung untuk menyeimbangkan sektor pariwisata kedua daerah; Pembangunan Masjid Terapung sebagai ikon baru Bangka Belitung sekaligus implementasi masyarakat melayu religius dan pengembangan sektor wisata unggulan; Pembangunan Museum GMT di Bangka dan Belitung untuk mendokumentasikan peristiwa alam tersebut secara lengkap sekaligus menguatkan brand Babel sebagai tempat GMT paling bersejarah; Meningkatkan status bandara Depati Amir (Bangka Tengah) dan HAS Hanandjoedin (Belitung) sebagai bandara udara internasional dalam rangka mendukung Provisi Bangka Belitung sebagai destinasi Pariwisata level Internasional; Melakukan inisiasi koordinatif yang intensif antara Provinsi Babel, kementerian ESDM, PLN dan Investor swasta dalam membangun PLTU sehingga PLTU di Babel bisa segera direalisasikan untuk membangun kemandirian Energi;

8. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Fokus kegiatan Membangun kultur masyarakat Babel yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bermoral melalui kegiatan keagamaan bernuansa religius seperti Babel mengaji, sajadah fajar, ruahan, dll secara rutin; Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar-menengah di seluruh wilayah Babel (SD-SMP-SMA); Meningkatkan kualitas Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai

salah satu Universitas Unggul Nasional dengan mendatangkan Professor bertaraf internasional secara periodik sebagai dosen tamu; Program beasiswa (S2-S3) dan pelatihan untuk para tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas guru maupun dosen; Menarik praktisi pendidikan kepariwisataan untuk membangun sekolah Tinggi Pariwisata dan Babel dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM/enterpreneur bidang pariwisata di Babel

9. PEMBANGUNAN KESEHATAN

Fokus kegiatan Peningkatan kualitas dan modernisasi fasilitas alat-alat kesehatan di Rumah Sakit; Kemudahan layanan kesehatan hingga biaya gratis bagi warga tidak mampu; Program ambulan keliling 24 jam untuk mencegah resiko kematian ibu dan Bayi; penguatan kapasitas para tenaga kesehatan melalui trining, beasiswa (S2-S3), hingga rekrutmen tenaga-tenaga kesehatan baik dengan insentif khusus untuk menunjang kinerja; Program Babel Sehat melalui pembinaan jasmani dan rohani secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Babel.

10. PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAAN PUBLIK

Fokus kegiatan Nongkrong bareng ("Nobar") program rutin bersama SKPD, Wakil Gubernur, bupati/Walikota untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi yang sebelumnya tidak terjalin dengan baik. Melalui kumpul di dunia nyata (Kantor, Restoran, warung, dsb) dan maya (WhatsApps Groups atau BBM Groups); Babel sebagai provinsi dengan integrasi pelayanan publik yang memberi kemudahan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi (smart city); Mengutakan sistem pelayanan publik yang mudah dan cepat, sehingga waktu pengurusan izin dan administrasi kependudukan menjadi lebih ringkas; Mempermudah pelayanan dengan berbagi perangkat teknologi yang terintegrasi seperti email, website, sosial media, aplikasi dan lainnya; Reformasi birokrasi berbasis kompetensi (meritokrasi) yaitu dengan proses promosi jabatan di Pemprov melalui fit and proper test dengan lelang jabatan

11. PEMBANGUNAAN BERDEMOKRASI

Fokus kegiatan mengoptimalkan pembuatan perda inisiatif dewan; mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga politik; meningkatkan kebebasan sipil masyarakat; meningkatkan hak politik masyarakat; meningkatkan pembinaan lembaga demokrasi

12. PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN

Fokus kegiatan pengalokasian anggaran tanggap bencana utamanya kebakaran hutan dan banjir, agar pemerintah provinsi lebih baik dan bertanggung jawab dalam merespon dan menangulanginya. Baik pada saat sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.

13. PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Fokus kegiatan pengendalian terhadap kualitas air, udara serta tutupan laha; pengendalian terhadap efek Gas Rumah Kaca

Untuk tema prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 sebagai berikut;

1. Tahun 2018, Tema Prioritas Pembangunan “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia”.
2. Tahun 2019, Tema Prioritas Pembangunan “Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas”.
3. Tahun 2020, Tema Prioritas Pembangunan “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan Kesehatan masyarakat dan Pendidikan Masyarakat”.
4. Tahun 2021, Tema Prioritas Pembangunan “Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan Pelayanan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah”.
5. Tahun 2022, Tema Prioritas Pembangunan “Mewujudkan Pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan tanggap bencana”.

BAB III

URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Program dan Kegiatan
 - Program 6
 - Kegiatan 30
3. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib (Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan)

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PERANGKAT DAERAH : BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisi k	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp		Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	6.722.628.000,00	7.513.939.000,00	100 %	6.842.408.671,00	91,06 %	671.536.329,00	8,94 %
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.355.068.000,00	4.969.575.000,00	100 %	4.723.996.268,00	95,06 %	245.578.732,00	4,94 %
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.498.920.000,00	1.857.974.000,00	100 %	1.677.866.803	90,31 %	180.113.197,00	9,69 %
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	198.500.000,00	248.500.000,00	100 %	107.374.200,00	43,21 %	141.125.800,00	56,79 %
4	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.750.000,00	7.750.000,00	100 %	6.488.000,00	83,72 %	1.262.000,00	16,28 %
5	Rapat Koordinasi Nasional Perencanaan Pembangunan	578.200.000,00	353.550.000,00	100 %	290.719.500,00	82,23 %	62.830.500,00	17,77 %
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.190.000,00	76.590.000,00	100 %	35.963.900,00	46,96 %	40.626.100,00	53,04 %

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

**PERANGKAT DAERAH : BAPPEDA PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

B	Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah	2.135.903.000,00	2.199.744. 000,00	100 %	1.525.101. 549	69,33 %	674.642. 451,00	30,6 6%
7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	628.900.000,00	628.900.00 0,00	100 %	591.333.34 9,00	94,03 %	37.566.65 1,00	5,97 %
8	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	53.150.000,00	53.150.000 ,00	100 %	33.050.000 ,00	62,18 %	20.100.00 0,00	37,8 2%
9	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	85.385.000,00	85.385.000 ,00	100 %	24.015.400 ,00	28,13 %	61.369.60 0,00	71,8 7%
10	Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	199.150.000,00	233.916.00 0,00	100 %	173.759.30 0,00	74,28 %	60.156.70 0,00	25,7 2%
11	Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	69.393.000,00	98.468.000 ,00	100 %	40.644.400 ,00	41,28 %	57.823.60 0,00	58,7 2%
12	Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah	1.035.000.000,00	1.051.625. 000,00	100 %	613.999.10 0,00	58,39 %	437.625.9 00,00	41,6 1%
13	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	64.925.000,00	48.300.000 ,00	100 %	48.300.000 ,00	100%	-	-
C	Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	324.747.000,00	100.791.0 00,00	100 %	79.012.20 0,00	78,39 %	21.778.8 00,00	21,6 0%
14	Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan	43.171.000,00	43.171.000 ,00	100 %	38.851.200 ,00	89,99 %	4.319.800 ,00	10,0 1%

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

**PERANGKAT DAERAH : BAPPEDA PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

	Pengembangan Wilayah I							
15	Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	18.850.000,00	26.850.000,00	100 %	17.688.400,00	65,88 %	9.161.600,00	34,12 %
16	Penyusunan Studi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	231.956.000,00	-	-	-	-	-	-
17	Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	24.670.000,00	24.670.000,00	100 %	19.287.600,00	78,18 %	5.382.400,00	21,82 %
18	Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	6.100.000,00	6.100.000,00	100 %	3.185.000,00	52,21 %	2.915.000,00	47,79 %
D	Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	435.602.000,00	90.010.000,00	100 %	31.870.208,00	35,40 %	58.139.792,00	64,59 %
19	Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I	41.030.000,00	41.030.000,00	100 %	11.126.600,00	27,12 %	29.903.400,00	72,88 %
20	Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II	34.225.000,00	34.225.000,00	100 %	17.518.608,00	51,19 %	16.706.392,00	48,81 %
21	Penyusunan Study Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA	329.392.000,00	-	-	-	-	-	-
22	Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I	8.670.000,00	8.670.000,00	100 %	450.000,00	5,19 %	8.220.000,00	94,81 %
23	Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II	22.285.000,00	6.085.000,00	100 %	2.775.000,00	45,60 %	3.310.000,00	54,40 %

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

**PERANGKAT DAERAH : BAPPEDA PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

E	Program Perencanaan Sosial,Budaya dan Pemerintahan	216.365.700,00	216.365.700,00	100 %	90.517.900,00	41,83 %	125.847.800,00	58,16 %
24	Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I	96.377.700,00	96.377.700,00	100 %	42.215.000,00	43,80 %	54.162.700,00	56,20 %
25	Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II	47.320.000,00	47.320.000,00	100 %	24.022.000,00	50,77 %	23.298.000,00	49,23 %
26	Penyusunan Study Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	47.324.000,00	47.324.000,00	100 %	18.830.900,00	39,79 %	28.493.100,00	60,21 %
27	Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan I	14.394.000,00	14.394.000,00	100 %	2.350.000,00	16,33 %	12.044.000,00	83,67 %
28	Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan II	10.950.000,00	10.950.000,00	100 %	3.100.000,00	28,31 %	7.850.000,00	71,69 %
F	Program Penelitian dan Pengembangan	896.575.500,00	1.383.921.500,00	83,33 %	822.901.289,00	59,46 %	561.020.211,00	40,53 %
29	Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah	256.721.000,00	256.721.000,00	100 %	138.463.453,00	53,94 %	118.257.547,00	46,06 %
30	Penguatan Jaringan Kelitbangan	142.475.500,00	329.675.500,00	100 %	197.035.470,00	59,77 %	132.640.300,00	40,23 %
31	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	125.634.000,00	515.780.000,00	100 %	371.858.581,00	72,10 %	143.921.419,00	27,90 %
32	Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Dalam Pembangunan	371.745.000,00	281.745.000,00	83,33 %	115.543.785,00	41,01 %	166.201.215,00	58,99 %

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	12	0	12
		Gol. III	52	1	52
		Gol.II	7	0	7
		Gol. I	0	0	0
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	4	0	4
		S2	21	0	21
		S1	38	0	38
		D. IV	0	1	1
		D. III	3	0	3
		D.I	0	0	0
		SMA/ sederajat	5	0	5
		SMP/ sederajat	0	0	0
		SD/ sederajat	0	0	0
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	0	1
		Eselon III	6	0	6
		Eselon IV	13	0	13
		Fungsional:			
		Tertentu	23	0	23
		Umum	29	0	29
JUMLAH TOTAL			72	72	72

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	PD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.831.738.450	679.250.000	9.830.521.200	995.000.000	22.336.509.650	19.569.029.451,00	87,61	BAPPEDA

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Nama Program Dalam Renja	RKPD	RPJMD
1.	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	√	√
2.	Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah	√	√
3.	Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	√	√
4.	Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	√	√
5.	Program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan	√	√
6.	Program Penelitian dan Pengembangan	√	√

7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, cukup atau Kurang)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	-	√	-

8. Permasalahan dan Solusi

- Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan daerah.
- Belum terintegrasi sistem perencanaan dan sistem penganggaran daerah.
- Masih rendahnya implikasi hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini terbukti dari belum sepenuhnya hasil pengendalian dan evaluasi yang dipakai sebagai salah satu bahan bagi umpan balik (*feed back*) untuk perencanaan selanjutnya.
- Belum optimalnya penyelenggaraan forum-forum perencanaan sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif.
- Belum optimalnya peran kelembagaan dalam peningkatan kualitas SDM Bappeda.

Solusi

- Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas rencana pembangunan yang terpadu, berkelanjutan melalui penggunaan sistem informasi perencanaan daerah yang telah dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan pemerintah.
- Mengintegrasikan antara sistem perencanaan dan sistem penganggaran pemerintah daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan.
- Mengoptimalkan implementasi aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan aplikasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- Peningkatan kualitas evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dengan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta review terhadap dokumen perencanaan yang telah ditetapkan
- Peningkatan kualitas forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, *Focus Group Discussion* dan Konsultasi publik yang menjadi sarana penyelerasan rencana kegiatan-kegiatan pembangunan
- Peningkatan kompetensi SDM aparatur secara lebih proporsional dan efisien melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, short course dan pendidikan penjenjangan.
- Memberi peran dan akses yang lebih kepada para pejabat fungsional tertentu untuk terlibat dalam berbagai kesempatan yang akan memperkaya wawasan dan pengalaman yang diperlukan dalam perencanaan.

9. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

BAB IV

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Pengelolaan Kawasan Khusus

1. Jenis Kawasan Khusus
Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (Pusat, Daerah, BUMN, Swasta dan atau Kerjasama) dan Dasar Hukum Penetapannya
 - Status Kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU)
 - Dasar Penetapannya adalah PP Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang
3. Sumber Anggaran
Swasta (PT. Belitung Pantai Intan)
4. Permasalahan Yang Dihadapi
Belum diberikannya fasilitas kemudahan berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Kawasan Khusus
 - a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Sekretaris Dewan Kawasan
 - b. Dinas PMPTSP Kabupaten Belitung sebagai Administrator Kawasan
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
 - a. Dewan Kawasan
 - b. Sekretariat Dewan Kawasan

(SK – di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi)

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

PROVINSI: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban Penataan Ruang	1	Kab/kota memiliki Perda IMB	Jumlah kab/kota memiliki Perda IMB dibagi jumlah yang wajib menyampaikan LPPD kab/kota dalam provinsi	- Kab/Kota memiliki perda IMB, sebanyak ----- daerah - Kab/kota usia di atas 3 tahun dan Kepala Daerah terpilih. %	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau PTSP
		Peraturan ttg Ketertiban Umum	2	Kab/kota memiliki perda tentang Ketertiban Umum	Jumlah Kab/Kota memiliki perda Ketertiban Umum dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD x 100 %	- Kab/Kota yang memiliki perda Ketertiban Umum, sebanyak ----- daerah - Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak ----- daerah. %	Sumber data dari Dinas Biro/Bagian Hukum
		Personil (Kebijakan ketersediaan alat tramtib)	3	Rasio personil SATPOL PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil SATPOL PP pada akhir tahun 2019 dibagi jumlah penduduk kali 50.000.	- Jumlah personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2019 = ----- orang - Jumlah penduduk pada akhir tahun 2019 = -----orang	... per 50.000 penduduk	Sumber data dari Dinas Trantibumlinmas
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA	Penyampaian laporan kepada Pemerintah	4	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP 13 Tahun 2019	Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2019 disampaikan pada tanggal ----- 2020 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ---- 2020.	Tepat / Tidak Tepat	Sumber data dari Bagian Pemerintahan/Otda

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	5	Ketepatan waktu penyampaian Lapkeu dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan tahun 2019, disampaikan pada tanggal ----- 2020 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal -----2020 - Laporan Kinerja tahun 2019. disampaikan pada tanggal ----- 2020 sesuai surat pengantar Nomor -----tanggal ----- 2020	- Tepat/ Tidak Tepat - Tepat/ Tidak Tepat	Sumber data dari Bagian Keuangan
		Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	6	Pemerintah Daerah yang Memiliki Produk Hukum Daerah tentang Penerapan SPM	Total Kabupaten/Kota yang sudah Memiliki Peraturan Daerah/Perkada tentang Penerapan SPM X 100% Rata-rata=urusan = Kab/kota	1. Kab/Kota ----- = ada atau tidak 2. Kab/Kota ----- = ada atau tidak 3. Kab/Kota ----- = ada atau tidak 4. Kab/Kota ----- = ada atau tidak 5. Dst .. Jumlah = ada atau tidak Kab/Kota	1. SPM Pendidikan 2. SPM Kesehatan 3. SPM PU dan Tata Ruang 4. SPM Perumahan dan Kawasan Permukiman 5. SPM Trantibum dan Linmas 6. SPM Sosial
		Hubungan antar daerah	7	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU pemprov dengan daerah lain (yang masih berlaku tahun 2019)	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2019, sebanyak ----- MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan ----- tentang kerjasama ---- 2) MOU dengan ----- tentang kerjasama ---- 3) Dst--- MOU	Sumber data dari Bagian Pemerintahan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	8	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi <u>Jumlah prioritas 1 pembangunan nasional</u>	- Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD), sebanyak 5 program. - Prioritas Pembangunan Nasional (RKP), sebanyak 5 program	100%	Sumber data dari BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Kewenangan	9	Rata-rata urusan yang dilaksanakan pada seluruh kab/kota dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2018) X 100%	- Total urusan yang dilaksanakan seluruh Kab/kota dibagi Jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD X 100% - Rata-rata=urusan = Kab/kota	1. Kab/Kota ----- = ---- urusan. 2. Kab/Kota ----- = ---- urusan. 3. Kab/Kota ----- = ---- urusan. 4. Kab/Kota ----- = ---- urusan. 5. <u>Dst ..</u> Jumlah = ---- urusan Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak ---- Kab/Kot. %	

¹ Program prioritas pembangunan nasional: (1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; (2) Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; (3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif; (4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air; dan (5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Kuangan	10	Waktu penetapan perda APBD tahun 2019	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan perda APBD Tahun 2019 (31 Desember 2018)	Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : 10 Tahun 2018 tentang APBD tahun 2019 Tanggal 28 Desember 2018	Tepat/ Tidak Tepat	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD. Tidak tepat , apabila APBD ditetapkan setelah 31 Desember 2018.
			11	Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak ada perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan daerah	Ada/ Tidak Ada	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD
			12	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2019. 1) Urusan Pendidikan Rp. ---- 2) Urusan Kesehatan Rp. ---- 3) PU dan Tata Ruang Rp. ---- 4) Perumahan & Kawasan Pemukiman Rp. ---- 5) Trantibum dan Linmas Rp. ---- 6) Sosial Rp. ---- Total Belanja pelayanan dasar Rp. ---- Total Belanja APBD 2019, sebesar Rp. -- %	Sumber data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang diambil merupakan realisasi keuangan (pada saat evaluasi menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit).

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			13	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan/ pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2019. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----- 2) <u>Urusan Kesehatan</u> Rp. ----- Total Belanja Pend & Kes Rp. ---- Total Belanja APBD 2019, sebesar Rp. -- %	Sumber data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah. Data Diambil dari : - Dinas Pendidikan - Perangkat Daerah lain yang melaksanakan urusan Pendidikan
		Pelayanan Publik	14	Keberadaan Perda tentang <u>Standar Pelayanan Publik</u> ² sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak ada standar pelayanan publik	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukum, Perda Nomor --- --- Tahun----- tentang ----- (standar pelayanan publik')	Ada/ Tidak Ada	Sumber data dari Bagian Hukum
		Kepegawaian	15	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Provinsi dibagi jumlah penduduk	- Jumlah PNS Provinsi tahun 2019 sebanyak 5.469 orang. - Jumlah penduduk provinsi tahun 2019 sebanyak ----- orang.	-----	Pembilang : Sumber data dari BKD Penyebut : Sumber data dari Bagian Dukcapil
			16	Persentase PNS Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi minimal D III (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Jumlah PNS Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal D III dibagi Jumlah PNS dikali 100%	Jumlah PNS Provinsi tahun 2019 yang memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal D III (Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan) 2.442 orang	44,65 %	Sumber data dari BKD

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Kelembagaan	17	Penataan Perangkat Daerah	Jumlah pembentukan Perangkat Daerah Berdasarkan PP 18 Tahun 2016	Jumlah Perangkat Daerah, sbb: 1) Biro (Setda) = ---- unit 2) Dinas = ---- unit 3) Badan = ---- unit 4) Kantor = ---- unit 5) Rumah Sakit = ---- unit 6) Lembaga Teknis lainnya = ---- unit Jumlah Perangkat Daerah = ---- unit	----- unit	Sumber data dari Ortala
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	18	Perda yang ditetapkan	Jumlah perda yang ditetapkan dalam tahun 2019	Perda yang ditetapkan dalam Tahun 2019, sebanyak ----- Perda (Daftar Perda terlampir) Perda	Sumber data dari Bagian Hukum (dengan menyebutkan Nomor, Tahun dan Nama Perda yang telah ditetapkan)

² Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri Kementerian/ Pimpinan LPND.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Raperda yang diajukan tahun berjalan	19	Raperda yang disetujui DPRD tahun 2019	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2019 dibagi Jumlah Raperda yang diusulkan tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019, sebanyak ----- RAPERDA. - RAPERDA yang diusulkan tahun 2019, sebanyak ----- RAPERDA. 	... %	Sumber data dari Bagian Hukum
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti	20	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang DPRD ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan oleh DPRD dalam tahun 2019 X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2019, sebanyak ----- keputusan. - Keputusan DPRD yang dihasilkan oleh DPRD dalam tahun 2019, sebanyak ----- keputusan. %	Sumber data dari Setwan DPRD
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindak lanjut keputusan Gubernur (KepGub)	21	Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti	Jumlah KepGub yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah KepGub yang dihasilkan dalam tahun 2019 X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti dalam tahun 2019, sebanyak ----- keputusan - Keputusan Gubernur yang dihasilkan dalam tahun 2019, sebanyak ----- keputusan. %	Sumber data dari Bagian Hukum

		Tindaklanjut Peraturan Gubernur (PerGub)	22	Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti	Jumlah PerGub yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah PerGub yang dihasilkan dalam tahun 2019 X 100%	- Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti dalam tahun 2019, sebanyak ----- Pergub. - Peraturan Gubernur yang dihasilkan dalam tahun 2019, sebanyak ----- Pergub. %	Sumber data dari Bagian Hukum
--	--	--	----	---	---	---	--------	-------------------------------

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	Perda yang dibatalkan	23	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi X 100%	- Perda yang dibatalkan, sebanyak -- ----, yang terdiri dari: 1) Perda Nomor ----- Tahun 2019 tentang ----- 2) Perda Nomor ----- Tahun 2019 tentang ----- 3) Dst. - Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak ----- Perda. %	Sumber data dari Bagian hukum
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	PERDA atau PerGub tentang konsultasi publik	24	Keberadaan PERDA atau PerGub tentang konsultasi publik	Ada atau tidak ada PERDA Atau PerGub	Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Ada	Sumber data dari Bagian Hukum/BAPPEDA (Berita Acara Hasil Musrenbang)
		Media informasi PEMDA yang dapat diakses oleh publik	25	Adanya media informasi PEMDA yang dapat diakses oleh publik (website, kotakpos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi. yang ditetapkan dengan PerGub	Apabila Ada, - Sebutkan nama media informasinya ----- dan - Sebutkan dasar hukumnya Pergub Nomor : -----Tahun ----- tentang --- --	Ada/ Tidak Ada	Sumber data dari Dinas Kominfo

9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	26	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Dana perimbangan yang terserap Tahun 2019 sebesar Rp. ---- - Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2019 sebesar Rp. ----- %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
---	--	--------------------------	----	--	---	--	---------	--

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	27	Belanja Publik terhadap DAU	Total belanja langsung dibagi DAU X 100%	- Belanja langsung APBD tahun 2019, sebesar Rp----- - DAU APBD Tahun 2019, sebesar Rp. ----- %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Alokasi Belanja pada APBD	28	Belanja Langsung terhadap total APBD	Jumlah belanja langsung dibagi APBD X 100%	- Belanja langsung APBD tahun 2019, sebesar Rp ----- - Total Belanja APBD Tahun 2019, sebesar Rp. ----- %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER- SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD X 100%	- PAD APBD Tahun 2019, sebesar Rp --- - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2019 (Realisasi), sebesar Rp. ---- %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	30	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018, dengan opini: ---- - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2019, dengan opini: ----	Opini tahun 2018 = ---- Opini tahun 2019= -----	Opini, : WTP/ <i>unqualified opinion</i>); WDP/ <i>qualified opinion</i>); TMP/ <i>disclaimer opinion</i>), atau TIDAK WAJAR (TW/ <i>adverse opinion</i>).
		Besaran SILPA	31	Rasio SILPA thdp total Pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan X 100%	- SILPA d a l a m A P B D Tahun 2019, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2019, sebesar Rp. ----- %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Realisasi Pendapatan	32	Rasio realisasi PAD terhadap anggaran pendapatan	Realisasi PAD dibagi total pendapatan APBD X 100%	- Realisasi PAD Tahun 2019, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2019, sebesar Rp. ----- %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Realisasi belanja	33	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total belanja APBD X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Tahun 2019, sebesar Rp ----- - Total Belanja dalam APBD Tahun 2019, sebesar Rp. ----- %	Pembilang : Sumber data berasal dari Laporan Realisasi Belanja/LRA Penyebut : Sumber data berasal dari total anggaran APBD
		Pengawasan Inspektorat Provinsi	34	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak ----- temuan. - Temuan BPK RI sampai dengan Tahun 2019, sebanyak.....temuan %	Sumber data dari Inspektorat. Data merupakan rekomendasi dari jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH ANGKA POTENSI DAERAH DIAMBIL DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG TERCANTUM DALAM RPJMD	Peta potensi daerah	35	Rasio realisasi PAD 2018 terhadap <u>potensi PAD</u> ³	Jumlah realisasi PAD 2018 dibagi dengan potensi PAD X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi PAD Tahun 2018, sebesar Rp. ----- - Potensi PAD Tahun 2019 , sebesar Rp----- %	Sumber data dari BPKAD
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	36	Peningkatan PAD	Kenaikan atau penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu X 100% Atau (PAD 2019- PAD 2018) : PAD 2018 X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total PAD pada Tahun 2018 sebesar Rp. ----- - Total PAD pada Tahun 2019 sebesar Rp.----- %	Sumber data dari BPKAD (target tahunan dalam RPJMD)

Angka Potensi Daerah Diambil Dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Tercantum Dalam RPJMD

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
13	TEROBOSAN/ INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	37	Penghargaan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2019.	Jumlah penghargaan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2019	Penghargaan yang diterima, sebanyak ---- yang terdiri dari 1) -----. 2) -----. 3) -----. 4) ----- Penghargaan	Sumber data dari Bagian Humas dan Perangkat Daerah yang menerima penghargaan
		Pengadaan barang dan jasa	38	Keberadaan E-procurement	Ada atau tidak ada E- procurement	Apabila ADA Sebutkan Penerapan e-procurement mulai operasi pada bulan ---- tahun ---	Ada/ Tidak Ada	Sumber data dari ULP. Data berupa proses e-procurement
		Daya saing daerah	39	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah Realisasi ijin investasi dalam tahun 2019	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2019, sebanyak ----- ijin dengan total nilai investasi sebesar Rp -----	... ijin	Sumber data dari Kantor PTSP (PMDN Nilainya >=500 jt)

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

PROVINSI : PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA PERANGKAT DAERAH: BAPPEDA

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Ada 5 program; a. Program Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah b. Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam c. Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan d. Program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan e. Program Penelitian dan Pengembangan	5 Program	Lihat di APBD Lampiran 1.3 (Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 8 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Penyusunan Dokumen RKPD 2. SOP ttg Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIN) 3. SOP ttg Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 4. SOP ttg Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)	8 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh menteri pembina teknis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						5. SOP ttg Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) 6. SOP ttg Penyusunan DPPA 7. SOP ttg Penyusunan Perubahan RKA 8. SOP ttg Penyusunan Renstra		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan Yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (PERDA/PERKADA Yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau Tidak Ada	- PERDA pelaksanaa n sebanyak 2 (Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, dan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022	Ada	Sumber data di Biro Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 20 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 20	100%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat daerah	Apabila Ada, - sebutkan nama bidang/jabatan fungsional Perencana Muda - Perencana Pertama - Perencana Muda - Penerjemah Pertama - Pranata Komputer Pertama - Pranata Komputer Muda - Pranata Humas Muda - Peneliti Pertama - Arsiparis Terampil - Analis Kebijakan Pertama - Analis Kebijakan Madya	Ada	Sumber data BKD/perangkat daerah terakhir/update tahun 2019
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS sebanyak 71 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5469 personil	1,298%	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan , sebanyak 18 org. - Pejabat, yang ada sebanyak 20 org.	90%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 20 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 20 jbt.	100 %	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA-Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 6 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 2019 3. RENJA PERUBAHAN 2019 4. RKA 2019 5. DPA 2019 6. DPPA 2019	6 jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah , sebanyak 5 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 Program	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah , sebanyak 5 program. - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah , sebanyak 5 program.	100 %	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi Anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 22.336.509.650 - Total Anggaran Belanja	0,728 %	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						APBD, sebesar Rp. 3.064.703.819.549,00		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 19.569.029.451,23 - Total Realisasi Belanja Perangkat APBD, sebesar Rp2.774.918.295.522,58 	0,705 %	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp - 9.391.811.817,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp 19.569.029.451,23 	47,99 %	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp - 10.177.217.634,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp19.569.029.451,23 	52 %	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: <ul style="list-style-type: none"> - LRA - Neraca - LO - LPE - CALK 	Ada sebanyak 5 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya Inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau	Ada, jenis dokumennya Buku	Ada	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					asset Perangkat Daerah	inventarisasi barang		
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp 12.416.551.293,23	0%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Pengumuman di Mass Media (Website http://bappeda.babelprov.go.id)	Jumlah sebanyak - 3 jenis.	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -- ---	tidak ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN

**ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					
		1	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	Menunjukkan jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	Jumlah	Sumber data dari Dinas Kominfo/ Perangkat Daerah yg menangani
		2	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD	$\frac{\text{Penjabaran program RPJMD dalam RKPD}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100 \%$	$\frac{168 \times 100}{168} = 100\%$	Sumber data Bappeda
		3	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100 \%$%	Sumber Bagian Keuangan
		4	Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB non migas}} \times 100\%$%	Sumber Bagian Keuangan
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures}}{\text{jumlah belanja APBD}} \times 100\%$%	Sumber Bagian Keuangan
		6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		Inspektorat Provinsi

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		7	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		Inspektorat Provinsi



**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ,
Jl. Pulau Belitung No. 2, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang
Tel: (0717) 439335, Fax: (0717) 439336